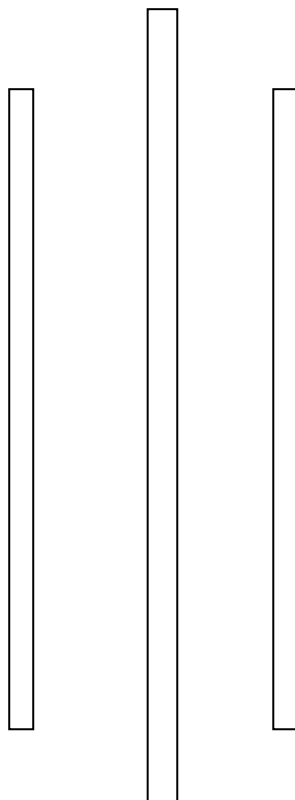




**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN  
NOMOR : 143 / 005 / 2009/ V/ 2009**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKPDesa )  
DESA PAKUNCEN TAHUN 2009**



DESA	:	PAKUNCEN
KECAMATAN	:	SELOMERTO
KABUPATEN	:	WONOSOBO



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
KEPALA DESA PAKUNCEN**

**Kode pos 56361**

Pakuncen, 15 Mei 2009

Nomor : 148/ / 2009/ V/ 2009  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDesa )  
Tahun 2009

Kepada.

Yth. BUPATI WONOSOBO  
Cq  
CAMAT SELOMERTO

Di  
SELOMERTO

Bersama ini, Kami sampaikan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 yang meliputi sbb :

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

1. VISI DAN MISI DESA
  - a. Visi Desa.
  - b. Misi Desa
2. GAMBARAN UMUM DESA
  - a. Kondisi Geografis
  - b. Kondisi Demografis
  - c. Pemerintahan Desa.
  - d. Kondisi Sosial
  - e. Kondisi Ekonomi.
3. PERMASALAHAN DESA
  - a. Kesehatan
  - b. Pendidikan
  - c. Ketenagakerjaan
  - d. Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil.
  - e. Sektor Pertanian
  - f. Infrastruktur
  - g. Permasalahan Lingkungan Hidup
  - h. Penyelenggaraan Pemerintahan

**B. STRATEGI PEMBAGUNAN DESA**

**C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKP DESA**

**D. SISTEMATIKA PEYUSUNAN RKP DESA**

## **BAB II      KERANGKA ANGGARAN DESA**

### **A    ANGGARAN DESA TAHUN BERJALAN**

1.    Pendapatan Desa
2.    Belanja Desa .
3.    Pembiayaan Desa.

### **B    PAGU ANGGARAN**

1.    Pagu Indikatif Anggaran Pendapatan Desa
2.    Pagu Indikatif Anggaran Belanja Desa

### **C    NORMA, PRINSIP ANGGARAN DESA**

1.    Norma Anggaran
2.    Prinsip Anggaran

## **BAB III    PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA**

1.    Penanganan Kemiskinan
2.    Pengembangan Ekonomi Rakyat
3.    Pembangunan Insfrastruktur
4.    Penyelenggaraan Pemerintah

## **BAB IV    RENCANA KERJA DAN BIAYA**

- A.    RKP Desa Pakuncen Tahun 2009 ( APBDesa )
- B.    RKP Desa Pakuncen Tahun 2009 ( APBD Kabupaten )
- C.    RKP Desa Pakuncen tahun 2009 ( APBD Provinsi dan APBN )
- D.    RKP Desa Pakuncen tahun 2009 ( Swadaya Masyarakat )

## **BAB V      PENUTUP**

Demikian dari kami untuk menjadikan perhatian dan terima kasih

Kepala Desa Pakuncen

MALNO



# **PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

## **KECAMATAN SELOMERTO**

### **DESA PAKUNCEN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN  
NOMOR : 143 / 005/ 2009/ V/ 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA )  
DESA PAKUNCEN TAHUN 2009

KEPALA DESA.

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan dan meselaraskan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Pakuncen tahun 2009
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-Desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor .... Seri ... Nomor ....

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :                    **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa) DESA PAKUNCEN TAHUN 2009**

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pakuncen
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
5. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya ;
6. Sekretariat Desa adalah unsur pelayan administrasi desa yaitu Kepala Urusan;
7. Pelaksana Teknis adalah pelaksana teknis yang melaksanakan tugas lapangan tertentu di Desa;
8. Unsur kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yaitu Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa, yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah suatu forum untuk merencanakan kegiatan pembangunan desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa selama 5 (lima) tahun disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten dan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 2**

(1).RKP Desa, Desa Pakuncen Tahun 2009 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KERANGKA ANGGARAN DESA  
BAB III : PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN BIAYA  
BAB V : PENUTUP

(2).RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan dan Dasar penyusunan APB Desa Tahun 2009

**Pasal 3**

Isi, uraian dan rincian RKP Desa sebagai dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1 ) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pakuncen  
Pada tanggal 15 Mei 2009  
KEPALA DESA PAKUNCEN

( M A L N O )

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>A.</b>	<b>LATAR BELAKANG .....</b>
1.	<b>VISI DAN MISI DESA .....</b>
a.	<b>Visi Desa. ....</b>
b.	<b>Misi Desa .....</b>
2.	<b>GAMBARAN UMUM DESA .....</b>
a.	<b>Kondisi Geografis .....</b>
b.	<b>Kondisi Demografis .....</b>
c.	<b>Pemerintahan Desa.....</b>
d.	<b>Kondisi Sosial.....</b>
e.	<b>Kondisi Ekonomi.....</b>
3	<b>PERMASALAHAN DESA .....</b>
a.	<b>Kesehatan .....</b>
b.	<b>Pendidikan .....</b>
c.	<b>Ketenagakerjaan .....</b>
d.	<b>Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil .....</b>
e.	<b>Sektor Pertanian .....</b>
f.	<b>Infrastruktur .....</b>
g.	<b>Permasalahan Lingkungan Hidup .....</b>
h.	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan .....</b>
<b>B.</b>	<b>STRATEGI PEMBAGUNAN DESA .....</b>
<b>C.</b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKP DESA .....</b>
<b>D</b>	<b>SISTEMATIKA PEYUSUNAN RKP DESA .....</b>
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA ANGGARAN DESA .....</b>
<b>A.</b>	<b>ANGGARAN DESA TAHUN BERJALAN .....</b>
1	<b>Pendapatan Desa.....</b>
2	<b>Belanja Desa.....</b>
3	<b>Pembiayaan Desa.....</b>
<b>B.</b>	<b>PAGU ANGGARAN .....</b>
1	<b>Pagu Indikatif Anggaran Pendapatan Desa .....</b>
2	<b>Pagu Indikatif Anggaran Belanja Desa .....</b>
<b>C.</b>	<b>NORMA, PRINSIP ANGGARAN DESA .....</b>
1	<b>Norma Anggaran .....</b>
2	<b>Prinsip Anggaran .....</b>
<b>BAB III</b>	<b>PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA .....</b>
1	<b>Penanganan Kemiskinan.....</b>
2	<b>Pengembangan Ekonomi Rakyat .....</b>
3	<b>Pembangunan Insfrastruktur .....</b>
4	<b>Penyelenggaraan Pemerintah .....</b>
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN BIAYA .....</b>
<b>A</b>	<b>RKP Desa Pakuncen Tahun 2009 ( APBDesa ) tahun 2009</b>
<b>B</b>	<b>RKP Desa Pakuncen Tahun 2009 ( APBD Kabupaten )</b>
tahun 2009	
<b>C</b>	<b>RKP Desa Pakuncen tahun 2009 ( APBD Propinsi dan APBN )</b>
tahun 2009	
<b>D</b>	<b>RKP Desa Pakuncen.tahun 2009 ( Swadaya Masyarakat )</b>
tahun 2009	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>

BAB I  
P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

1. VISI DAN MISI DESA

- a. VISI : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat
- b. MISI :
  - 1. Meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan desa yang ada
  - 2. Meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat dengan basis partisipasi masyarakat
  - 3. Meningkatkan terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga pemerintahan desa yang ada dengan masyarakat

2. GAMBARAN UMUM DESA

a). KONDISI GEOGRAFIS

- a. Letak Wilayah  
Terletak disebelah selatan kota Wonosobo, yaitu :
  - ✓ Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Selomerto : 1,5 km
  - ✓ Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo : 7 km

b. Luas Wilayah

No	Kondisi Wilayah	Luas (Ha)	Prosentase
1.	Lahan Sawah	62,556	82,141 %
a.	Irigasi Teknis	-	0 %
b.	Irigasi ½ Teknis	10,531	13,828 %
c.	Irigasi Sederhana	52,025	68,313 %
d.	Tadah Hujan	-	0 %
2.	Lahan Kering	13,600	17,858 %
a.	Pekarangan dan Bangunan	5,658	7,429 %
b.	Tegalan / Kebun	2,022	2,655 %
c.	Padang Gembala	-	0 %
d.	Kolam / Tambak	0,975	1,280 %
e.	Hutan Negara	-	0 %
f.	Lain-lain (jln, sungai dll)	4,945	6,493 %
	J u m l a h	76,156	100 %

- c. Batas Wilayah
  - ✓ Sebelah Barat : Sungai serayu ( Dusun Wonokasih )
  - ✓ Sebelah Utara : Sawah ( Desa Kalierang )
  - ✓ Sebelah Timur : Jalan Desa ( Kelurahan Selomerto )
  - ✓ Sebelah Selatan : Sawah ( Desa Gunungtawang )

b). KONDISI DEMOGRAFIS

a. Perkembangan Penduduk

No	Dusun	Jml Penduduk Akhir Tahun 2007		Jumlah Perkembangan Penduduk								Jml Penduduk Akhir Tahun 2008	
				Lahir		Mati		Datang		Pergi			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pakuncen	400	427	8	6	3	4	15	12	3	5	417	436
2	Krotok	222	240	1	2	2	2	10	9	2	1	229	248
	Jumlah	622	667	9	8	5	6	25	21	5	6	646	684



b. Jumlah Penduduk dirinci Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Prosentase
1	Buruh Tani	185	13,909 %
2	Petani Sendiri	21	1,578 %
3	Peternak Unggas	-	0 %
4	Penggalian	2	0,150 %
5	Industri	2	0,150 %
6	Bangunan	45	3,383 %
7	Perdagangan	33	2,481 %
8	Transportasi	27	2,030 %
9	PNS / Honor daerah	17	1,278 %
10	TNI	5	0,375 %
11	POLRI	7	0,526 %
12	Pensiunan	4	0,300 %
13	Lainnya	982	73,834 %
	Jumlah	1.330	100,000 %

c. Jumlah Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak Sekolah	187	15,416 %
2	Tamat SD	559	46,084 %
3	Tamat SLTP	204	16,817 %
4	Tamat SLTA	238	19,620 %
5	D-1	1	0,082 %
6	D-2	8	0,659 %
7	D-3	3	0,247 %
8	D-4	-	0 %
9	S-1	13	1,071 %
10	S-2	-	0 %
11	S-3	-	0 %
	Jumlah	1.213	100,000 %

c). PEMERINTAHAN DESA

a. Perangkat Desa

Jumlah perangkat desa dirinci menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tamat SD	4	50,000 %
2	Tamat SLTP	1	12,500 %
3	Tamat SLTA	3	37,500 %
4	Sarjana Muda	-	0 %
5	Sarjana	-	0 %
	Jumlah	8	100,000 %

b. Badan Perwakilan Desa

Jumlah anggota BPD dirinci menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tamat SD	2	40,000 %
2	Tamat SLTP	2	40,000 %
3	Tamat SLTA	1	20,000 %
4	Sarjana Muda	-	0 %
5	Sarjana	-	0 %
	Jumlah	5	100,000 %

- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa  
 Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan desa dirinci menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Anggota				Jumlah	Prosentase
		LKMD	RW	RT	PKK		
1	Tamat SD	-	2	10	11	23	54,8 %
2	Tamat SLTP	1	-	-	6	7	16,6 %
3	Tamat SLTA	3	-	-	5	8	19,0 %
4	Sarjana Muda	-	-	-	2	2	4,8 %
5	Sarjana	-	-	-	2	2	4,8 %
	J u m l a h	4	2	10	26	42	100 %

- d. Tanah Bengkok  
 Luas tanah bengkok dirinci menurut nama perangkat desa

No	Nama Perangkat Desa	Luas (Ha)	Pemanfaatan ( Ha )	Prosentase
1	Malno	4,959	3,837	39,790 %
2	Mahmudin	1,660	1,660	17,214 %
3	Abdul Latif	1,165	1,165	12,081 %
4	Setyo Pamungkas	0,710	0,710	7,362 %
5	Salikin	0,710	0,710	7,362 %
6	Nikun Putra	0,710	0,710	7,362 %
7	M. Sholeh	0,451	0,451	4,676 %
8	Miskam	0,400	0,400	4,148 %
	J u m l a h	10,765	9,643	99,995 %

- e. Tanah Kas Desa  
 Luas tanah kas desa dirinci menurut kondisi lahan dan pemanfaatannya

No	Tanah Kas Desa	Luas (Ha)	Pemanfaatan
1	Sawah	1,171	Disewa tahunan dana untuk pembangunan rolak jalan Dusun Krotok dan papingisasi jalan makam Desa Pakuncen
2	Lahan Kering	-	-
	J u m l a h	1,171	

d). SOSIAL

- a. Keagamaan  
 Jumlah penduduk dirinci menurut agama

No	Agama	Jumlah Penduduk	Prosentase
1	I s l a m	1.322	99,398 %
2	Kristen	8	0,601 %
3	Katolik	-	0 %
4	Budha	-	0 %
5	Hindu	-	0 %
	Jumlah	1.330	100 %

Jumlah sarana peribadatan

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Masjid	3	100 %
2	Mushola	-	0 %
3	Gereja	-	0 %
4	Kuil	-	0 %
5	Pura	-	0 %
	Jumlah	3	100 %

Pernikahan dan Perceraian

No		Jumlah	Prosentase
1	Jumlah Pernikahan	16	72,727 %
2	Jumlah Perceraian	6	27,272 %
	Jumlah	22	100 %

b. Pendidikan

Kondisi Pendidikan Masyarakat

No	Uraian	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1
2	Siswa Taman Kanak-kanak	37
3	Sekolah Dasar	1
4	Siswa Sekolah Dasar	138
5	Anak Usia 7 - 15 Tahun yang tidak sekolah	9
6	Anak SD yang dropt out	0
7	Anak SD yang tinggal kelas	12
8	Lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP	43

c. Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Kader Posyandu	6
2	Anggota Kelompok Donor Darah	32
3	Anggota Ambulan Desa	5
4	Jumlah Bayi Lahir Hidup	17
5	Jumlah Kelahiran Bayi yang ditolong Bidan	17
6	Jumlah Kelahiran Bayi yang ditolong Dukun Bayi	-
7	Jumlah Kematian Bayi (umur 0 - 1 th)	-
8	Jumlah Kematian Balita (umur > 1 th - 5 th)	-
9	Jumlah Kematian Ibu	-

d. Keluarga Berencana

No	Uraian	Jumlah
1	Pasangan Usia Subur	207
2	Wanita Usia Subur	336
3	Peserta KB MOP	8
4	Peserta KB MOW	28
5	Peserta KB IUD / Spiral	6
6	Peserta KB Kondom	4
7	Peserta KB Implan / Susuk	12
8	Peserta KB Suntik	83
9	Pserta KB Pil	16

e). KONDISI EKONOMI

a. Transportasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah
1	Panjang jalan desa kondisi baik (km)	2,320
2	Panjang jalan desa kondisi rusak (km)	0,750
3	Jumlah jembatan desa kondisi baik	2
4	Jumlah jembatan desa kondisi rusak	-
5	Jumlah Kendaraan Roda 4	8
6	Jumlah kendaraan roda 2	85
7	Jumlah Wartel	1
8	Jumlah Televisi	143
9	Jumlah Radio	132

b. Perdagangan

No	Uraian	Jumlah
1	Pasar Umum	-
2	Pasar Hewan	-
3	Toko / Warung	21
4	Warung Makan	-
5	Toko Besi / Bangunan	-
6	Kios Saprotan	-
7	Koperasi	1
8	Bank	-
9	BMT	-

c. Pertanian

Luas tanam dan produksi Tahun 2008

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha / Batang)	Produksi (Ton)
1	Padi	55,505	277/ tahun
2	Jagung	2	6/ tahun
3	Ubi Jalar	-	-
4	Ubi Kayu	3	34/ tahun
5	Kacang Panjang	-	-
6	Cabe	6	36/ tahun
7	Pisang	1	20/ tahun
8	Klengkeng	-	-
9	Sukun	-	-
10	Manggis	-	-
11	Durian	-	-
12	Salak	1,5	5/ tahun
13	Kelapa	1	37.500 biji/ tahun
14	Kopi	-	-
15	Cengkih	-	-
16	Panili	-	-

Populasi Ternak Tahun 2008

No	Tenak	Jumlah
1	Sapi Perah	-
2	Sapi Biasa	3
3	Kerbau	12
4	Kambing	8
5	Kuda	-
6	Domba	-
7	Ayam Kampung	367
8	Ayam Petelur	-
9	Ayam Pedaging	-
10	Itik	253
11	Kolam Ikan	123

d. Industri dan Kerajinan

No	Jenis	Jumlah Pengusaha / Pengrajin
1	Makanan Olahan / tempe	3 orang
2	Pembuatan mebel	2 orang

### 3. PERMASALAHAN DESA

#### **a. Kesehatan**

1. Masyarakat kebanyakan kurang terjaga kesehatannya itu terjadi antara lain dikarenakan Tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dilingkungan desa, dan minimnya ekonomi sebagian masyarakat sehingga kurang memperhatikan cara hidup sehat.
2. Sampah banyak berserakan dilingkungan masyarakat sehingga bisa menimbulkan penyakit.

#### **b. Pendidikan**

Mayoritas masyarakat pendidikannya masih rendah , kebanyakan lulusan SD dan SLTP dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pendidikan dan minimnya ekonomi sebagian masyarakat sehingga kurang memperhatikan tentang pendidikan..

#### **c. Ketenagakerjaan**

Minimnya pendidikan dan ketrampilan dari masyarakat sehingga kalah bersaing dalam dunia kerja mengakibatkan banyak terdapat pengangguran.

#### **d. Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil**

Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil ada di desa namun tidak berlangsung cukup lama, karena kalah bersaing dalam pemasaran dan daya beli masyarakat yang kurang disebabkan kondisi ekonomi yang pas-pasan .

#### **e. Sektor Pertanian**

Sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian, namun cara bertani dan pengolahan tanah masih tradisional sehingga kurang baik dalam hasil panen pertanian perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan pertanian dan manajemen pertanian.

#### **f. Infrastruktur**

Didesa telah diadakan pembangunan saluran air bersih yang bersumber dari mata air yang disalurkan ke rumah warga , namun masih terdapat kendala yaitu air mengalir kurang besar/ lancar

#### **g. Permasalahan Lingkungan Hidup**

Lingkungan desa Pakuncen agak sulit dalam program pengembangan desa, itu disebabkan lokasi desa yang dikelilingi sungai dan tanah bengkok, untuk mengadakan pemekaran desa harus diadakan tukar guling tanah bengkok, sehingga tanah menjadi milik pribadi masyarakat dan bisa diadakan pemekaran desa. Kondisi lingkungan antar rumah di desa sudah agak sempit mulai jarang adanya lahan kosong maupun kebun sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membuang sampah. Kalau hal tersebut dibiarkan masyarakat lalu membuang sampah akhirnya di sungai-sungai dan itu sangat mengganggu lingkungan dan kesehatan buat kita juga lahan pertanian bagi masyarakat. Upaya untuk menanggulangi masalah sampah tersebut adalah dengan dibangunnya TPS ( Tempat Penampung Sementara sampah ), namun karena ekonomi masyarakat yang rata-rata masih rendah sehingga menyulitkan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

#### **h. Penyelenggaraan Pemerintahan**

Penyelenggaraan pemerintah berjalan cukup baik, namun belum maju seperti yang diharapkan, itu dikarenakan SDM ( Sumber Daya Manusia ) dari aparat pemerintah Desa dan lembaga Desa yang mayoritas lulusan SD dan SLTP. Sehingga perlu diadakannya pelatihan – pelatihan dan pendidikan tentang pemerintahan kepada aparat pemerintah dan lembaga yang ada.

## B. STRATEGI PEMBAGUNAN DESA

### a) Strategi

Agar partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat bagi tegaknya sistem pemerintahan yang demokratis dapat berjalan optimal, pemerintah desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, pikiran dan pendapat guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKP DESA

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah menjabarkan RPJM Desa kedalam perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun 2009.

Sedangkan tujuannya antara lain :

1. Menselaraskan dan mensinergikan dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten dan propinsi.
2. Menselaraskan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan desa dari berbagai sumber pembiayaan.

## D. SISTEMATIKA PEYUSUNAN RKP DESA

1. BAB I : PENDAHULUAN
2. BAB II : KERANGKA ANGGARAN DESA
3. BAB III : PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA
4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN BIAYA
  - A. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA APB DESA
  - B. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA APBD KABUPATEN
  - C. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA APBD PROVINSI DAN APBN
  - D. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA SWADAYA MASYARAKAT
5. BAB V : PENUTUP

BAB II  
KERANGKA ANGGARAN DESA

A. ANGGARAN DESA TAHUN BERJALAN

1. Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2008

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
1.1	Hasil usaha desa	0
1.2	Hasil kekayaan desa	22.400.000
1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	42.706.200
1.4	Hasil gotong royong	37.124.000
1.5	Hasil pajak desa	0
1.6	Hasil retribusi desa	2.280.000
1.7	Hasil bunga deposito / simpanan desa	0
1.8	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	0
<b>2</b>	<b>Bagi hasil pajak Desa kabupaten dan retribusi Desa kabupaten</b>	
2.1	Bagi hasil pajak Desa kabupaten	0
2.2	Bagi hasil retribusi Desa kabupaten	0
<b>3</b>	<b>Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Desa kabupaten</b>	
3.1	Alokasi dana desa (ADD)	146.534.000
<b>4</b>	<b>Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten</b>	
4.1	Bantuan Pemerintah	0
4.2	Bantuan Pemerintah Provinsi	0
4.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten	50.400.000
<b>5</b>	<b>Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat</b>	
5.1	Hibah	0
5.2	Bantuan keuangan	0
	<b>Jumlah Anggaran Pendapatan Desa</b>	<b>301.444.200</b>

2. Anggaran Belanja Desa Tahun 2008

No	Uraian Belanja Desa	Jumlah
1	2	3
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
1.1	Belanja Pegawai / Personalia	98.400.000
1.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.300.000
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	0
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000
1.6	Belanja Bagi Hasil	0
1.7	Belanja Tidak Terduga	0
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>103.700.000</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	
2.1	Belanja Pegawai	58.475.231
2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.731.620
2.3	Belanja Modal	79.037.349
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>195.244.200</b>
	<b>Jumlah Belanja Desa</b>	<b>298.944.200</b>

3. Anggaran Pembiayaan Desa Tahun 2008

No	Uraian Pembiayaan Desa	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Penerimaan Pembiayaan	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Desa	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0
1.6	Penerimaan Piutang Desa	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa	2.500.000
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0
2.4	Pemberian Pinjaman Desa	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000
	Pembiayaan Netto	2.500.000

B. PAGU ANGGARAN

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan di tingkat desa, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Desa Kabupaten Wonosobo No ... tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan, maka perlu dipaparkan tentang kerangka anggaran desa. Kerangka anggaran itu, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk pagu indikatif anggaran desa.

Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen antara lain meliputi :

1. Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen untuk tahun 2009 dengan mengacu APB Desa tahun 2008.
2. Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen belum termasuk memperhitungkan sumber-sumber pendapatan desa yang lain seperti bagian dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan pemerintah dan propinsi, kenaikan dan penurunan ADD dan sebagainya.
3. Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

Penyusunan penganggaran secara terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran desa sehingga menghasilkan dokumen RKP Desa. Sedangkan penyusunan berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan. tingkat kegiatan yang ditetapkan pada awal siklus anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran pada tahun yang direncanakan dan untuk menentukan anggaran pada tahun yang direncanakan dan prakiraan satu tahun kedepan bagi program yang bersangkutan.

C. NORMA, PRINSIP ANGGARAN DESA

1. Norma Anggaran

Norma anggaran pada dasarnya merupakan aturan dasar dari manajemen pengelolaan keuangan desa yang harus diikuti agar amanat yang diberikan oleh rakyat dapat dicapai. Aturan dasar dalam pengelolaan keuangan desa antara lain meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ..... Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- n. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 050/ 230/ 2009/ IX/ 2006 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen ( RPJM Desa ) Tahun 2006 - 2010

## 2. Prinsip Anggaran

Prinsip anggaran adalah nilai-nilai dasar dan kaidah yang harus dijadikan pedoman sehingga anggaran desa dapat dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip anggaran tersebut meliputi :

### a. Komprehensif dan Disiplin.

Anggaran desa adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan, anggaran Desa harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan cara-cara yang dapat diterima oleh semua pihak.

### b. Fleksibilitas

Keleluasaan Desa dalam menyusun anggaran yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi relevan yang dimiliki dan arahan kabupaten serta inisiatif dan prakarsa masyarakat Desa.

### c. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran Desa. Sebaliknya bila kebijakan sering berubah-ubah maka Desa akan menghadapi ketidak-pastian dalam pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran Desa.

### d. Kejujuran

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.

e. Informatif

Informatif adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik, karenanya pelaporan yang teratur tentang biaya, output dan dampak suatu kebijakan adalah memegang peran yang sangat penting.

f. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran Desa, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak pula untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran.

h. Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.

Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal.

Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target / tujuan kepentingan publik.

### BAB III

#### PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas pembangunan desa tahun 2009 dirumuskan berdasarkan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2009. Berdasarkan analisis masalah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka prioritas pembangunan desa Pakuncen tahun 2009 diarahkan untuk :

##### 1. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan di desa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi ; pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pekerjaan.

###### a. Pendidikan

Prioritas bidang pendidikan pada tahun 2009 diarahkan untuk mendukung upaya penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta peningkatan derajat pendidikan masyarakat antara lain dengan memberikan bea siswa kepada berprestasi dan tidak mampu, dan pemberian bantuan kegiatan pendidikan non formal. Serta pembangunan pagar halaman taman kanak-kanak agar para murid dan guru lebih tenang dan enak dalam kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar

###### b. Kesehatan

Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dibidang kesehatan. Dengan penyelesaian pembangunan sara kesehatan yaitu gedung PKD ( Poliklinik Desa ) dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui kegiatan posyandu. Serta pembangunan bak penampung sampah bagi masyarakat agar tidak membuang sampah disembarangan.

###### c. Pemenuhan Pekerjaan

Diadakannya pelatihan perikanan, ikan pada kolam maupun mina padi.

##### 2. Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pengembangan ekonomi rakyat diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi rakyat yang memberi insentif atau berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dengan meemberdayakan koperasi simpan pinjam atau UP2K

##### 3. Pembangunan Infrastruktur

Prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun ini adalah pembangunan penambahan saluran air bersih untuk desa Pakuncen, Pembangunan Peninggian pasanagan saluran Tenagah Dusun Krotok, Pembangunan Saluran Drainase/ air Limbah Desa Pakuncen dan Pembangunan Pagar TK Pertiwi Pakuncen, juga Pemasangan Tralis makam Guntur Geni Desa Pakuncen.

##### 4. Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas pembangunan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengadakan Bintek peningkatan sumber daya aparatur pemerintah/ Perangkat Desa.

## BAB V P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) adalah merupakan penjabaran RPJM Desa kedalam perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun 2009.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) tersebut, diharapkan akan terjadi keselarasan dan kesinergisan dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten dan provinsi dan juga dalam pembiayaan pembangunan desa dari berbagai sumber pembiayaan. Sehingga partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi tegaknya sistem pemerintahan yang demokratis dapat berjalan optimal, pemerintah desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, pikiran dan pendapat guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

## Format / contoh

### BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas pembangunan desa tahun 2008 dirumuskan berdasarkan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2008. Berdasarkan analisis masalah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka prioritas pembangunan desa Pakuncen tahun 2008 diarahkan untuk :

#### 5. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan di desa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi ; pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pekerjaan.

##### d. Pendidikan

Prioritas bidang pendidikan pada tahun 2008 diarahkan untuk mendukung upaya penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta peningkatan derajat pendidikan masyarakat

##### e. Kesehatan

Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dibidang kesehatan.

##### f. Pemenuhan Pekerjaan

Prioritas bidang ini diarahkan untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan kualitas daya saing pencari kerja.

#### 6. Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pengembangan ekonomi rakyat diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi rakyat yang memberi insentif atau berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah melalui revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi, kerajinan, usaha kecil dan industri rumah tangga.

#### 7. Pembangunan Infrastruktur

- Prioritas pembangunan infrastruktur antara lain menyangkut sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman
8. Penyelenggaraan Pemerintahan
- Prioritas pembangunan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27										